



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

Para anggota parlemen menyerukan persatuan dengan masyarakat sipil untuk menangkis ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Asia Tenggara

DILI, TIMOR-LESTE, 3 August 2016 – Masa depan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia berada di bawah ancaman di Asia Tenggara dan anggota parlemen dan masyarakat sipil dari seluruh kawasan ini akan harus bekerja bersama-sama jika mereka ingin bertahan, peringatan dari anggota parlemen dalam pertemuan dengan ratusan perwakilan masyarakat sipil kemarin.

"Kita harus mencegah erosi demokrasi di tahun-tahun mendatang," Ucap anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari dalam pertemuan. Menekankan pentingnya ancaman yang memunculkan kemerosotan demokrasi, ia berpendapat bahwa mengatasi masalah hak asasi manusia lainnya membutuhkan tingkat akuntabilitas dan keterwakilan sejati yang hanya dapat diberikan oleh pemerintahan yang demokratis.

"Mari kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa ASEAN menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Karena demokrasi, dengan semua tantangannya, adalah satu-satunya cara untuk memecahkan semua masalah hak asasi manusia ini, "Lanjutnya.

Komentar itu dibuat, pada saat para anggota parlemen dari delapan negara berkumpul pada hari Selasa untuk "*Town Hall Forum*" (Pertemuan Publik) yang diselenggarakan oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), dalam permulaan dari '*ASEAN Peoples' Forum 2016*', pertemuan tahunan terbesar dari masyarakat sipil di kawasan ini.

Mengambil pertanyaan dari hadirin, para anggota parlemen membahas status hak asasi manusia dan demokrasi di Asia Tenggara, sambil menyoroti tantangan yang berkembang terkait pengikisan demokrasi dan dampak dari proses integrasi ASEAN yang sedang berlangsung pada para masyarakat di kawasan itu.

Anggota Majelis Nasional Kamboja Mu Sochua mencatat bahwa negara-negara ASEAN berada di suatu spektrum, dari mereka yang telah lebih atau kurang menganut demokrasi secara penuh hingga ke mereka yang di mana praktik demokrasi tidak ada sama sekali. Di antaranya terdapat pemerintahan seperti Kamboja, yang hanya memiliki komitmen untuk proses demokrasi di kulit luarnya saja.

Turut memuji kerja keras dari kelompok masyarakat sipil di seluruh wilayah, dia mengakui bahwa, "dalam berbagai hal di situasi ini, tetap masih merupakan sebuah perjuangan untuk organisasi berbasis masyarakat dan serikat pekerja untuk membawa masalah mereka."

Mantan anggota parlemen dari Thailand Rachada Dhanadirek menggambarkan bagaimana di negaranya saat ini, partai-partai politik dilarang melakukan kegiatan formal, sehingga masyarakat sipil memimpin perjuangan untuk demokrasi setelah lebih dari dua tahun militer mengambil alih kekuasaan dalam kudeta.

Salah satu peserta masyarakat sipil dari Laos juga mengangkat kekhawatiran tentang meningkatnya keterbatasan ruang untuk CSO independen di negerinya, terutama sejak bulan Desember 2012 dimana menghilangnya tokoh aktivis masyarakat sipil Sombath Somphone. Perwakilan masyarakat sipil memilih untuk tidak menyelenggarakan ASEAN Peoples' Forum tahun ini di Laos, meskipun pemerintah Laos merupakan ketua ASEAN saat ini, sebagai akibat dari represi intens yang dihadapi oleh para aktivis dan organisasi independen di Laos.

Anggota DPR RI Mercy Barends membahas perlunya demokratisasi ekonomi ASEAN untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas.

"Ketika kita berbicara tentang integrasi ASEAN, kita umumnya berbicara tentang integrasi berbasis pasar," Ucap Mercy Barends. Oleh karena itu ia menambahkan, perlu adanya kebutuhan mendesak untuk ASEAN untuk memperluas upaya integrasi regional dan lebih fokus secara holistik pada masalah – masalah yang dihadapi oleh orang-orang dari ASEAN.

Mu Sochua mengajukan argumen yang sama sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. "ASEAN sekarang mewakili perekonomian terbesar ketujuh di dunia," katanya. "Akan tetapi pertumbuhan dan kemajuan belum berpusat pada rakyat dalam hal melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental."

Dalam rangka ASEAN menjadi sebuah komunitas yang berbasis pada masyarakat, ia berpendapat bahwa, "sistem politik harus direformasi untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara lebih efektif."

Menanggapi pertanyaan dari peserta masyarakat sipil, para legislator juga membahas peran mereka dalam memastikan bahwa negara-negara anggota ASEAN memenuhi komitmen internasional hak asasi manusia mereka.

"Yang penting bagi kita adalah untuk dapat menggunakan kapasitas pengawasan kami," kata anggota Kongres asal Filipina Teddy Baguilat Jr. "Ini adalah salah satu kapasitas yang kurang dijalankan oleh Kongres di Filipina. Sebagai anggota parlemen, kita perlu fokus pada fungsi pengawasan kami untuk memastikan hukum diterapkan dengan benar."

"Sebagai anggota parlemen, itu adalah tugas kita untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak dapat bersuara dan menjadi suara untuk hak asasi manusia," ucap Kasthuri Patto, anggota Parlemen dari Malaysia. "Itu bermuara pada kemauan politik. Saya percaya ASEAN bisa menjadi komunitas yang berbasis pada masyarakat, tetapi hal itu membutuhkan kerja keras dari kita semua."

Anggota parlemen menyatakan harapan bahwa pertemuan publik ini akan mengarah kepada dialog yang lebih aktif dan berkelanjutan antara anggota parlemen dan masyarakat sipil.

"ASEAN bisa menjadi komunitas yang berpusat pada rakyat, tetapi kita perlu lebih banyak forum seperti ini, di mana para anggota parlemen dapat belajar dari para LSM, dan para LSM dapat belajar dari berbagai pengalaman di negara- negara lain," kata Dr Nguyen Van Tien, mantan anggota Majelis Nasional Vietnam.

"Tantangannya adalah jarak antara masyarakat ASEAN dan pemerintah ASEAN," tambah Mu Soehua. "Saya berharap bahwa diskusi ini dapat berkontribusi untuk ide-ide konkret untuk bagaimana suara Anda di sini dapat dibawa ke pertemuan ASEAN berikutnya."

"Saya masih percaya ada banyak ruang untuk harapan," lanjutnya. "Setiap hari saya melihat kekuatan rakyat semakin kuat dan kuat, meskipun perjuangan semakin sulit dan sulit."

Legislator lain yang hadir di pertemuan publik termasuk Presiden Parlemen Timor-Leste Aderito Hugo da Costa dan U Htay Kywe, anggota Parlemen Myanmar. ASEAN Peoples ' Forum di Timor-Leste berlangsung hingga 5 Agustus.